

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 184 PIDANA KHUSUS  
TAHUN 2019 DIPENGADILAN NEGERI BATURAJA  
TENTANG PUTUSAN BEBAS PADA TERDAKWA  
BANDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh :

**REIZA SAFRIANI RAHAYU  
41151010150165**

**STUDI KASUS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**ANALYSIS OF JURISPRUDENCE NUMBER:  
184/Pid.Sus/2019/Baturaja COURT APPEAL AS  
CLAUSE UNRESTRAINED VERDICT OF DEFENDAT  
NARCOTICS TRADER BASED ON ACCORDING TO  
LAW NUMBER 8 OF 1981 CONCERNING CRIMINAL  
PROCEDURES**

**By:  
REIZA SAFRIANI RAHAYU  
4115 1010 150165**

**Case Study**

**To qualify one the exam requirement to passed the law scholar degree in law  
study program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reiza Safriani Rahayu

NPM : 41151010150165

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : Analisis Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri  
Baturaja tentang Putusan bebas pada terdakwa bandar  
narkotika menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981  
tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,

Reiza Safriani Rahayu  
41151010150165

## ABSTRAK

Putusan bebas terhadap perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota POLRI bersumber dari acara pembuktian dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) dan dakwaan subsidair pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan bebas (*Vrijspraak*) hakim Pengadilan Baturaja ini sangatlah menciderai jiwa dan rasa keadilan masyarakat, namun adanya perbedaan persepsi keadilan dari sisi lainnya, bahwa sisi keadilan hukum formil dianggap adil namun menimbulkan banyak hujatan dan pertanyaan para akademisi, Sehingga penulis membatasi permasalahan hukum dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut : Bagaimanakah bentuk pertimbangan hukum hakim atas putusan yang membebaskan terdakwa bandar narkotika telah sesuai dengan KUHP? dan bagaimana Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Hakim pada terdakwa bandar narkotika menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia?

Metode penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan studi kasus meneliti data primer yang bersumber dari putusan pengadilan, spesifikasi penelitian menghususkan meneliti aspek yuridis normatif, secara otomatis data yang di kumpulkan adalah data primer yang terkait dengan aspek hukum, terkait judul berupa Undang-undang, KUHP, kemudian disusun secara sistematis agar dapat dilakukan analisa hukum secara terstruktur.

Hasil Penelitian bahwa Hakim dalam memutuskan perkara seharusnya lebih progresif, yaitu mempertimbangkan *judex jurist* yang telah memutuskan perkara Rudial Bin Arifin terdakwa bandar narkotika di bebaskan, Penerapan progresif Pasal 112 dan Pasal 114 dinilai memiliki konsekuensi pilihan hukum dengan cara *non penal*, penemuan hukum progresif mengenai pembuktian 112 dan 114 khususnya dalam hal penyitaan saat pemadaman listrik memiliki aturan dalam mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan mencari dan menemukan hukum bagi bandar narkotika yang seharusnya divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika, dan juga kesimpulan kedua adalah Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Hakim (*vrijspraak*) pada Terdakwa bandar Narkotika melakukan upaya hukum peninjauan kembali, karena upaya kasasi Nomor 3815 K/Pid.Sus/2019 telah ditolak oleh hakim kasasi dalam putusan sela nya, strategi hukum jaksa terhadap ditolaknya putusan kasasi, maka klausula permohonan peninjauan kembali tersebut berisikan *novum* berupa saklar yang mudah dijangkau oleh rudial, untuk menguatkan pembuktian *judex factie*, yaitu *novum* untuk menguatkan hukum pembuktian (*jourist*) atas adanya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika (112 dan 114) serta memperkuat kaidah yurisprudensi No. 1386 K/Pid.Sus/2011 khususnya tentang unsur kontekstual dan tujuan kepemilikan narkotika. Maka saat inilah hakim peninjauan kembali dapat menafsirkan hukum progresif dalam pertimbangan *judex jurist* nya.

## ABSTRACT

An event which can reasonably be suspected of being a criminal act, then a legal process can be carried out starting with an investigation which can then be upgraded to investigating, prosecuting and trying the case. In terms of carrying out its duties, the Criminal Procedure Code (HAP) gives the competent authorities the authority to carry out acts of force. The treatment of suspects must be humane and uphold human rights (HAM) and a sense of justice. As a consequence, at all levels of examination in the judicial process, suspects or defendants may not be treated arbitrarily as parties who are merely considered guilty. As for the problem How is the legality of confiscation of evidence in pretrial excise crime related to the Criminal Procedure Code? What are the inhibiting factors for the legality of confiscation of evidence in pretrial excise crime related to the Criminal Procedure Code?

The research method used is to use the normative juridical research method, namely legal research carried out by reviewing and testing secondary data in the form of positive law, especially in the field of criminal law related to the Legality of Confiscation of Evidence in Pre-trial Crime of Excise linked to the Book of Law. Criminal Procedure Law. While data analysis uses qualitative juridical methods, namely data that will be processed and analyzed qualitatively from library data and other sources which are then systematically arranged to be analyzed qualitatively and presented descriptively.

Results of the study show that judges in deciding cases, judges should be more progressive considering *judex jurist*, namely deciding the case of Rudial Bin Arifin, the defendant narcotics dealer being released by criminalizing it under Articles 112 and 114 of the Narcotics Law, the progressive application of Article 112 and Article 114 is considered to have consequences for choice of law in non penal, the progressive legal findings regarding proof 112 and 114 especially in the case of confiscation during a power outage have rules requiring judges to consider seeking and finding laws for narcotics dealers who should be convicted of having committed the crime of selling Narcotics, and also the second conclusion is the Prosecutor's Legal Efforts The Public Prosecutor against the Judge's Free Decision (*vrijspraak*) on the Narcotics bandar Defendant made a legal reconsideration effort, because the cassation attempt Number 3815 K / Pid.Sus / 2019 was rejected by the cassation judge in his interlocutory decision, the prosecutor's legal strategy was *tusan cassation*, then the clause of the request for review contains a *novum* in the form of a switch that is easily accessible by *rudials*, to strengthen the *judex factie* proof, namely *novum* to strengthen the law of proof (*jourist*) for the existence of elements of possession, storing, controlling or providing Narcotics (112 and 114) as well as strengthening the rule of jurisprudence No. 1386 K / Pid.Sus / 2011 especially on contextual elements and the purpose of narcotics possession. So now is the time for the judicial review judge to interpret the progressive law in his *judex jurist* considerations.

## KATA PENGANTAR

**Assalammualaikum, wr ,wb.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Studi Kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Studi Kasus yang penulis ajukan adalah:

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 184PIDANA KHUSUS TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA TENTANG PUTUSAN BEBAS PADA TERDAKWA BANDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat selaku pembimbing, Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si ucapan terima kasih penulis jugsampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai wali dosen penulis.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai Dosen Penguji Penulis.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai dosen penguji.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Kepada kedua orang tua yaitu Pupun Erpini dan ayahanda Syafrizal, dan tidak lupa Studi Kasus ini saya persembahkan kepada suami tercinta Bambang

Wahyu Pranoto dan seluruh keluarga besar saya, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman khususnya kelas-B2 angkatan tahun 2015 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmudi Universitas langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

Bandung, 08 September 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Hlm</b>
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	5
<b>BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI</b>	
A. Permasalahan Hukum.....	8
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Penggeledahan Dan Penyitaan.....	8
a. Penggeledahan.....	8
b. Penyitaan.....	13
2. Putusan Hakim ( <i>Het Vonnis</i> ) .....	21
a. Putusan Pemidanaan.....	25
b. Putusan Bebas ( <i>vrijspraak</i> ).....	25
c. Putusan Lepas ( <i>Onslag</i> ).....	27
d. Bentuk Putusan Hakim.....	27
2. Upaya Hukum.....	29
a. Kasasi.....	31
b. Peninjauan kembali.....	31

3. Tindak Pidana Narkotika.....	33
a. Pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009.....	33
b. Pasal 114 Undang-undang No 35 Tahun 2009.....	34
c. Pembuktian Pasal 112 & Pasal 114 Undang-undang.....	35
1) Pasal 91 Ayat (1).....	35
2) Pembuktian Berdasarkan yurisprudensi No.1386/K/Pid.....	35
3) Pembuktian Pasal 112 Menurut Putusan MK.No.31/PUU...	37
4)Teori Pembuktian MenurutKUHAP.....	41
 BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
A Ringkasan Putusan.....	56
B Pertimbangan Hukum Hakim.....	56
 BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 184 PIDANA KHUSUS TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA DAN UPAYA HAKIM DAN JAKSA TERHADAP PUTUSAN BEBAS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981.	
A Pertimbangan hukum Hakim Terhadap Terdakwa Bandar Narkotika Dalam Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN BtaTidak Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.....	66
B Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Hakim Pada Terdakwa Bandar Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .....	72
 BAB V KESIMPULAN	
Kesimpulan.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN PUTUSAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**